

**Transformasi Pertahanan Indonesia di Era Reformasi (1998-2018):
Perspektif *Revolution in Military Affairs* (RMA)**

Clara Veraditha¹, Impiani²

Abstrak

Pertahanan Indonesia telah mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan ini meliputi perubahan mendasar dalam empat bidang militer utama yaitu doktrin, organisasi, strategi dan teknologi. Dengan menggunakan variabel dalam *Revolution in Military Affairs* (RMA) sebagai kerangka analisis, tulisan ini akan melihat signifikansi Indonesia melakukan revolusi militer dengan mengambil rentang waktu dari tahun 1998-2018. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode *process tracing*. Temuan dari tulisan ini adalah militer Indonesia melakukan adaptasi dengan konsep RMA yaitu melakukan perubahan dari segi doktrin, strategi, organisasi dan teknologi yang kemudian dikenal dengan Revolusi Krida Yudha. Upaya revolusi bertahap yang dilakukan dalam rentang waktu yang cukup lama, menjadikan upaya pembangunan pertahanan Indonesia ini lebih relevan disebut sebagai transformasi. Maka dari itu, Revolusi Krida Yudha merujuk pada proses transformasi pertahanan Indonesia dari Era Reformasi (1998) hingga saat ini.

Kata Kunci: Pertahanan, Militer Indonesia, Revolusi Militer, Transformasi

¹ Penulis merupakan mahasiswa aktif Pascasarjana Hubungan Internasional di Universitas Indonesia. Clara.veraditha@gmail.com

² Penulis merupakan Lulusan Pascasarjana Hubungan Internasional di Universitas Indonesia, Impiani@ui.ac.id

Pendahuluan

Pengenalan nuklir pada akhir Perang Dunia II dengan dijatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagsaki oleh Amerika Serikat menyebabkan perubahan yang sangat signifikan pada revolusi persenjataan militer secara global yang dikenal sebagai *Revolution in Military Affairs* (RMA). Gelombang RMA ditandai dengan antusiasme negara pada teknologi yang menyebabkan perubahan mendasar pada empat bidang utama militer yaitu doktrin, strategi, organisasi dan teknologi. Setiap negara mulai mengadaptasi RMA di dalam badan militernya masing-masing, termasuk Indonesia. Kekuatan militer Indonesia telah mengalami transformasi dari masa ke masa. Konsep RMA diadaptasi oleh konvensional militer Indonesia dengan nama Revolusi Krida Yudha.

Era reformasi di tahun 1998 menjadi penanda penting bagi transformasi pertahanan di Indonesia, sekaligus merupakan faktor internal Indonesia melakukan transformasi. Pasalnya, salah satu tuntutan dari reformasi 1998 adalah pencabutan dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Tuntutan pencabutan

dwifungsi ABRI ini berisikan tuntutan rakyat terhadap pembatasan hak-hak militer dalam urusan sipil dan menghapuskan fungsi sosial politik yang dimiliki militer seperti duduk di kursi pemerintahan, menjadi anggota partai politik, hingga mengelola bisnis pribadi. Hal ini dimaksudkan agar militer dapat bekerja dengan lebih profesional. Untuk itu, UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI menetapkan bahwa tentara profesional tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan hanya bertugas untuk menjaga keamanan negara (Balairungpress, 2018).

Dalam ranah praktis, tuntunan dwifungsi ABRI terwujud dalam pemisahan ABRI menjadi Polisi Republik Indonesia (POLRI) dan Tentara Negara Indonesia (TNI). Dengan pemisahan ini, polisi memiliki tugas utama yaitu menjaga keamanan dan TNI yang menjaga pertahanan negara. Perubahan ini tentu saja berdampak pada perubahan doktrin militer yang selama ini dianut, hingga pada modernisasi alutsista. Seperti yang dikemukakan oleh Krepinevich (2006) bahwa RMA juga dapat diartikan sebagai perubahan paradigma dalam karakter dan bagaimana perang dijalankan, dengan ciri penggunaan teknologi baru ke dalam

sistem militer yang digabungkan dengan konsep operasional yang inovatif dan adaptasi organisasional. Dari pandangan Krepinevich (2006) ini bisa dikatakan bahwa transformasi pertahanan militer Indonesia mengarah pada konsep RMA.

Tulisan ini akan membahas apa signifikansi Indonesia untuk merevolusi badan militer dan apakah upaya pembangunan sistem pertahanan Indonesia relevan disebut dengan revolusi atau sebenarnya transformasi. Untuk menjawab pertanyaan tersebut tulisan ini akan menggunakan variabel *Revolution in Military Affairs* (RMA) milik Krepinevich (2006). Berdasarkan pandangan Krepinevich (2006), revolusi militer terdiri dari empat elemen: pengembangan sistem, perubahan teknologi, inovasi operasional, dan adaptasi organisasi. Tulisan ini akan mengambil fokus rentang waktu 1998-2018, karena pada tahun 1998 adalah titik awal perubahan badan militer Indonesia dan melihat perubahan apa saja yang terjadi dalam kurun waktu 20 tahun.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode *process tracing* untuk menunjukkan *causal mechanism* (Beach, 2016) dalam kasus

ini. *Process tracing* atau penelusuran proses digunakan untuk menjelaskan mekanisme sebab-akibat yang dapat menghubungkan penyebab dan hasil dalam populasi kasus yang serupa secara kausal. Adapun data penelitian ini berupa *secondary source document* atau dokumen sekunder seperti buku, jurnal, maupun artikel dari media-media online dan cetak dengan rentang waktu data yang dikumpulkan adalah dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2018. Kemudian metode pengumpulan data yang akan digunakan adalah *archival and documents-based research* atau melakukan studi pustaka dan penelusuran berita, khususnya dari media daring. Setelah data berhasil dikumpulkan, penulis melakukan triangulasi agar data yang diperoleh valid dan reliable untuk digunakan sebagai dasar dalam analisis. Triangulasi dilakukan dengan cara membandingkan sejumlah data yang didapatkan dalam penelitian dan mencocokan data temuan dengan pertanyaan di dalam penelitian. Pembahasan akan dibagi dalam dua subbahasan yaitu Transformasi Doktrin Militer Indonesia dan Modernisasi Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista).

Kemudian bagian penutup akan terbagi

pada simpulan dan rekomendasi.

Transformasi Doktrin Militer Indonesia

Variabel *Revolution in Military Affairs* (RAM) yang pertama milik Krepinevich (2006) adalah pengembangan sistem. Sistem yang dimaksud dalam revolusi militer adalah semua hal yang berkaitan dengan dasar suatu militer dijalankan. Dalam hal ini, pengembangan sistem

pembinaan kemampuan dan penggunaan kekuatan TNI. (Mabes TNI, Doktrin Tridek, Keputusan Panglima TNI Nomor Kep /2 /I /2007 Tanggal 12 Januari 2007, Jakarta 2007).

secara sederhana dapat dilihat pengembangan atau perubahan doktrin militer.

Doktrin TNI sebagai piranti lunak merupakan pedoman TNI dalam melaksanakan tugas pokok dan perannya sebagai alat pertahanan negara, bersumber dari pengalaman sejarah, nilai-nilai intrinsik perjuangan bangsa dan teori, mulai dari yang bersifat konsepsional sampai dengan yang bersifat operasional implementatif keadaan geografis wilayah, serta mempertimbangkan persepsi kepemimpinan tentang eskalasi ancaman, perkembangan teknologi dan perubahan lingkungan strategis yang melandasi pola pikir, pola sikap, dan pola tindak dalam

Sebuah doktrin akan berubah dan bertransformasi sesuai dengan lingkungan strategis global, regional, maupun lokal agar relevansinya tetap terjaga. Hal ini menunjukkan bahwa doktrin merupakan sebuah prinsip yang fundamental bagi sebuah badan yang memiliki pergerakan, karena doktrin berfungsi sebagai landasan atau asas. Begitu pun dengan doktrin militer Indonesia, hal ini tercermin dari doktrin militer Indonesia yang dikeluarkan pada tahun 2007. Doktrin militer Indonesia di tahun 2007, berbeda dengan doktrin yang dianut oleh militer Indonesia di masa-masa sebelumnya.

Pada era reformasi 1998, militer Indonesia harus melepaskan bayang-bayang pengaruh rezim Soeharto dan menuju kondisi yang menjunjung demokrasi, maka doktrin yang berlaku di masa Orde Baru mau tidak mau akan berganti dengan doktrin yang lebih relevan dengan semangat reformasi. Beberapa

perubahan pasca jatuhnya rezim Soeharto adalah menghilangkan keseluruhan struktur teritorial (karena hal ini dianggap mengabadikan kekuatan politik militer) dan pengalihan personil tentara ke polisi secara besar-besaran (Rizanny, 2018). Doktrin baru yang kemudian diadopsi TNI disebut "Paradigma Baru." Paradigma Baru dikembangkan oleh sebuah tim perwira senior yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono dan diumumkan oleh Panglima ABRI saat itu, Jenderal Wiranto, pada Agustus 1998. Tujuan doktrin Paradigma Baru adalah menggeser fokus tradisional TNI dari keamanan dalam negeri ke pertahanan luar. Doktrin Paradigma Baru ini juga menunjukkan pergeseran orientasi militer Indonesia.

Kepolisian (sebelumnya di bawah komando angkatan bersenjata) kini telah dibentuk sebagai organisasi terpisah, langsung dibawahi oleh presiden. Intensi para reformis militer adalah untuk mentransfer fungsi keamanan internal kepada kepolisian. Menurut doktrin baru tersebut, polisi harus mengembangkan kemampuan paramiliter untuk menghadapi pemberontakan dan ancaman keamanan internal berskala

besar. TNI bertugas hanya memberikan bantuan ke polisi, ke pemerintah pusat, dan hanya jika polisi tidak dapat menangani sebuah situasi. Hal ini menunjukkan transformasi pertahanan dalam perubahan organisasi, variabel lain dalam RMA milik Krepinevich (2006).

Kini berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI nomor Kep/21/I/2007, TNI memiliki doktrin yang disebut Tri Dharma Eka Dharma. Doktrin yang disebut TRIDEK ini merupakan strategi pertahanan negara dalam mencegah, menangkal dan mengatasi ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara dalam berbagai bentuk. Doktrin tersebut membawa spirit persatuan antara tiga matra yaitu udara, laut, dan darat (Puspen, 2007).

Seiring terjadinya perubahan strategis pada tatanan global maupun regional, militer Indonesia atau TNI memiliki tantangan baru yaitu perang asimetris, karena perang asimetris tidak bersifat perang secara militer bersenjata, namun perang dalam dimensi kehidupan lainnya yakni politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Hal ini juga yang disebut tantangan non-tradisional. Bergesernya tantangan dari tradisional ke non-

tradisional disebabkan oleh bergesernya kekuatan bipolar menjadi multipolar dan globalisasi (Rizanny, 2018). Tantangan-tantangan inilah yang hadir sebagai pemicu terjadinya transformasi pertahanan yang disebut Revolusi Krida Yudha yang meliputi doktrin militer Indonesia, modernisasi alutsista, hingga pengembangan nuklir. Faktor pemicu lain adalah masifnya pembangunan sistem pertahanan yang dilakukan oleh negara di kawasan Asia. Revolusi ini memiliki signifikansi agar militer Indonesia mampu menjaga kedaulatan negara sebagai badan pertama yang akan berhadapan langsung jika terjadi ancaman. Maka dari itu, upaya antisipasi diwujudkan dengan terus membangun sistem pertahanan militer Indonesia.

Modernisasi Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista)

Modernisasi alutsista merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan kekuatan militer. Kekuatan militer ditunjang dengan kekuatan pertahanan yang memadai, maka dari itu persenjataan terus diproduksi dan diperbarui. Kualitas dan kuantitas alutsista yang dimiliki suatu

negara akan sangat memengaruhi kedudukannya dalam kancah politik Internasional (Asaduddin, 2014). Tidak terkecuali Indonesia, militer Indonesia terus membangun sistem pertahanannya dengan melakukan pembaruan alutsista. Pembaruan alutsista merupakan indikator dari variabel RMA Krepinevich (2016) perubahan teknologi dan inovasi operasional. Berikut adalah data pembelian alutsista Indonesia dari tahun 1998 (Era Reformasi) hingga 2018:



Gambar 1. Pembelian Alutsista Indonesia 1998-2018

Sumber: Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)

Dari grafik tersebut terlihat bahwa Indonesia terus meningkatkan jumlah transaksi pembelian alutsista. Berdasarkan data dari SIPRI, dalam rentang waktu 20 tahun Indonesia tercatat melakukan transaksi pembelian alutsista dengan 28 negara, dengan total 235

transaksi dengan frekuensi transaksi tertinggi dengan Perancis yaitu sebanyak 37 kali. Pada peringkat kedua, Indonesia melakukan transaksi tertinggi dengan Amerika Serikat yaitu 35 transaksi. Pasca era Orde Baru 1998, Indonesia pernah mengalami embargo pembelian senjata oleh Amerika Serikat. Hal ini disebabkan oleh tragedi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan Kopasus terhadap warga Timor-Timur yang pada masa itu dalam proses melepaskan diri dari Indonesia. Akibatnya adalah Amerika Serikat menjatuhkan embargo senjata terhadap Indonesia. Semasa embargo senjata berlangsung, Indonesia mengalami kesulitan untuk mendapatkan suku cadang dan perawatan untuk operasional kendaraan tempur, baik matra Darat, Laut dan Udara. Pesawat angkut dan pesawat tempur yang dimiliki Indonesia terpaksa dihanggarkan. Embargo ini membuat Amerika tidak menjual persenjataan kepada Indonesia terhitung sejak 1998-2005 (Atdikbud USA, 2013). Selain transaksi dengan Amerika Serikat, pemasok alutsista tertinggi lain yaitu Jerman, Rusia, China, dan Korea Selatan.

Sistem pertahanan dalam bidang militer terbagi kepada beberapa kategori. Kategorisasi ini merujuk pada jenis senjata konvensional utama (*Major Conventional Arms*) suatu negara. Kategori persenjataan tersebut adalah sebagai berikut:

Kategori Senjata Konvensional Utama	
Category I	: Battle Tanks
Category II	: Armoured combat vehicles
Category III	: Large-calibre artillery system
Category IV	: Combat Aircraft and unmanned combat aerial vehicles (UCAY)
Category V	: Attack helicopters
Category VI	: Warship
Category VII	: Missiles and missile launches

Tabel 1. Kategorisasi Senjata Konvensional

Utama

Sumber: *United Nations Register of Conventional Arms* (UNROCA)

Dalam kurun waktu 20 tahun membangun pertahanan, Indonesia secara bertahap membangun sistem pertahanannya termasuk dalam pembelian senjata konvensional utama. Berikut data yang dirilis oleh *United Nations Register of Conventional Arms* (UNROCA) perihal kepemilikan *Major Conventional Arms* hingga tahun 2008:

INDONESIA	
<i>Kategori I (Tank Tempur)</i>	0 unit
<i>Kategori II (Tempur Lapis baja)</i>	104 unit
<i>Kategori III (Sistem Artilleri Kaliber Besar)</i>	15 unit
<i>Kategori IV (Pesawat Tempur)</i>	55 unit
<i>Kategori V (Helikopter Penyerang)</i>	2 unit
<i>Kategori VI (Kapal Perang)</i>	37 unit
<i>Kategori VII (Misil dan Peluncur)</i>	110 unit

Tabel 2. Jumlah Senjata Konvensional Indonesia 2008

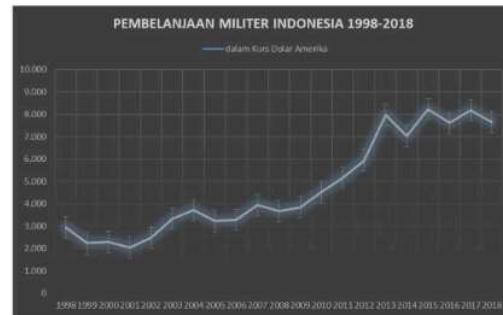
Sumber: *United Nations Register of Conventional Arms* (UNROCA)

Kemudian berikut adalah jumlah alutsista milik Indonesia per 2019, terdiri dari alutsista matra udara, darat dan Laut:

Data Pencapaian Aspek Fisik Alutsista Tiap Matra					
	Sebelum MEF	MEF I (2015-2019) per Des 2018	MEF II (2020-2024) target	MEF III (2020-2024) target	Postur Ideal
TNI AD		64,89%	74,62%		100%
Senjata ringan	92.155	613.043	649.062	723.564	783.462
Meriam/Roket/Rudal	962	1.144	1.371	1.354	2.162
Ranpur	1.321	1.641	2.000	3.738	4.858
Pesawat Terbang	67	104	121	224	1.224
TNI AL		55,55%	68,72%		100%
KRI	144	146	161	182	262
Kapal selam	2	2	4	8	12
Pesawat Udara	62	72	85	100	160
Ranpur Marinir	413	440	503	978	1.481
TNI AU		43,97%	44,40%		100%
Pesawat	211	261	267	344	469
Radar	17	20	29	32	32
Rudal	0	0	0	72	96
Penangkis Serangan Udara (PSU)	20	24	24	64	216

Tabel 3. Total Jumlah Alutsista Indonesia 2018

Modernisasi alutsista tentu saja berbanding lurus dengan anggaran perbelanjaan pertahanan. Anggaran perbelanjaan Indonesia terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Berikut adalah grafik pembelanjaan militer Indonesia sejak tahun 1998-2018



Gambar 2. Pembelanjaan Militer Indonesia 1998-2018

Sumber: *Military Expenditure-Stockholm International Peace Research Institute* (SIPRI)

Dari grafik tersebut terlihat bahwa peningkatan tertinggi pembelanjaan terjadi sejak tahun 2011 yang mencapai 5,17 miliar dollar USD atau setara dengan 21,5 triliun rupiah. Kemudian setelah tahun 2013 anggaran belanja pertahanan Indonesia selalu berkisar antara 7-8 miliar USD atau setara dengan 77-84 triliun rupiah. Modernisasi alutsista TNI ini merupakan rencana jangka panjang untuk menjangkau kebutuhan minimum TNI. Upaya peningkatan ini terbagi dalam tiga tahap perencanaan strategis (renstra) yaitu Renstra I (2010-2014), Renstra II (2015-2019), dan Renstra III (2020-2024). Dengan peningkatan anggaran dari tahun ke tahun ini, militer Indonesia serius mengadopsi teknologi militer terbaru. Pada tahun 2016, pemenuhan alutsista Indonesia sudah mencapai 40% dari

target 100% di tahun 2024 (BBC Indonesia, 2014). Peningkatan anggaran Kementerian Pertahanan ini terus berlanjut hingga sekarang, di APBN 2018 anggaran Kemhan mencapai 99,8 triliun dan menjadi 108,4 triliun di APBN 2019 (JPNN, 2019).

Deretan alutsista yang dimiliki Indonesia di tahun 2018 dibandingkan dengan alutsista yang dimiliki Indonesia di tahun-tahun sebelumnya menunjukkan peningkatan secara kualitas maupun kuantitas. Hal ini memperlihatkan bagaimana militer Indonesia beradaptasi dengan konsep RMA dengan melakukan transformasi dari segi doktrin, strategi, organisasi dan teknologi. Tetapi upaya bertahap yang dilakukan dalam rentang waktu yang cukup lama, menjadikan upaya pembangunan pertahanan Indonesia ini lebih relevan disebut sebagai transformasi dibanding revolusi. Maka dari itu, Revolusi Krida Yudha lebih tepat merujuk pada proses transformasi pertahanan Indonesia dari Era Reformasi (1998) hingga saat ini.

Penutup

alutsista secara bertahap dan meningkatnya anggaran belanja pertahanan setiap tahunnya.

Pertahanan Indonesia secara garis besar ditopang oleh satu badan yaitu TNI (UU No.3/2002 tentang Pertahanan Negara). Sedangkan POLRI bertugas pokok di sektor keamanan negara dan ketertiban masyarakat. Kehadiran dua badan ini merupakan hasil dari proses panjang revolusi militer Indonesia dari masa ke masa. Revolusi militer Indonesia meliputi perubahan mendasar pada doktrin, organisasi, strategi dan teknologi yang kemudian dikenal dengan Revolusi Krida Yudha. Revolusi militer ini merupakan adaptasi terhadap konsep (*Revolutionary in Military Affairs*) RMA global. Hal ini bisa dilihat dari terpenuhinya variabel RMA milik Krepinevich (2006) pada revolusi militer Indonesia. Revolusi militer Indonesia yang terjadi secara bertahap dan dalam kurun waktu yang cukup lama lebih relevan disebagai transformasi. Artinya, militer Indonesia melakukan perubahan secara bertahap karena menyesuaikan dengan tuntutan kondisi internal di Indonesia, bukan perubahan drastis karena ancaman eksternal. Hal ini terlihat dari pembaruan dan penambahan

Daftar Pustaka

- Asaduddin, Andi Chandra. 2014. *Transformasi TNI AD Dalam Bidang Pertempuran*. Diakses dari <https://tni.mil.id/view-61909-transformasi-tni-ad-dalam-bidang-pertempuran.html> pada 25 Januari 2021
- Atdkbud USA. 2013. Hubungan Amerika Serikat dengan Indonesia Sebelum dan Sesudah Embargo Senjata, Dikaji Dalam Bidang Militer. Diakses dari <http://education.embassyofindonesia.org/2013/10/hubungan-amerika-serikat-dengan-indonesia-sebelum-dan-sesudah-embargo-senjata-dikaji-dalam-didang-militer/> pada 25 Januari 2021
- Balairungpress. 2018. Dwifungsi dan Transformasi Bisnis Militer Pasca Reformasi. Diakses dari <https://www.balairungpress.com/2018/11/dwifungsi-dan-transformasi-bisnis-militer-pasca-reformasi/> pada 25 Januari 2021
- BBC Indonesia, 2014. *TNI: modernisasi alutsista lampau target*. Diakses dari https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/10/141006_preview_hut_tni pada 25 Januari 2021
- Krepinevich, A. F. (2006). Cavalry to Computer: The Pattern of Military Revolutions. *The National Interest*, 30(13).
- Mabes TNI, *Doktrin Tridek*, Keputusan Panglima TNI Nomor Kep /2 /I /2007 Tanggal 12 Januari 2007, Jakarta 2007
- Rizanny, Dickry. (2018). *Menuju TNI Berkomitmen Global, Perlukah Doktrin TNI Berubah?*. Diakses dari <http://maritimnews.com/2018/03/menuju-tni-berkomitmen-global-perlukah-doktrin-tni-berubah/> pada 25 Januari 2021
- JPNN, 2019. DPR RI Dukung Modernisasi Alutsista TNI. Diakses dari <https://www.jpnn.com/news/dpr-ri-dukung-modernisasi-alutsista-tni-nih-buktinya> pada 25 Januari 2021



Puspen. (2007). Konsepsi Strategi Pertahanan Negara sesuai Doktrin Tni Tri Dharma Eka Karma (Tridek). Diakses dari <https://tni.mil.id/view-5131-konsepsi-strategi-pertahanan-negara-sesuai-doktrin-tni-tri-dharma-eka-karma-tridek.html> pada 25 Januari 2021